



**~~ BAHAN ~~**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SEKRETARIAT DAERAH PROINSI BANTEN**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada awal tahun anggaran 2021 ini, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menyusun Bahan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Anggaran 2020 lingkup penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan.

Evaluasi ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Anggaran 2020 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk *"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"*.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 7 Januari 2021

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**



**GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741004 199402 1 002

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Sasaran .....	1
C. Dasar Penyusunan .....	1
<b>BAB II URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III RENCANA DAN REALISASI KINERJA.....</b>	<b>10</b>
1. Rencana dan Realisasi Input .....	10
2. Rencana dan Realisasi Output .....	12
3. Rencana dan Realisasi Outcome .....	33
4. Rencana dan Realisasi Capaian Program .....	35
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN URUSAN DESENTRALISASI. ....</b>	<b>36</b>
<b>BAB V URUSAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DILAKSANAKAN ....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI URUSAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN .....</b>	<b>39</b>
1. Pembinaan Batas Wilayah .....	39
<b>BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .....</b>	<b>40</b>
1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja .....	40
2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja .....	45
3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya .....	49
4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	50
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai .....	50
6. Analisa Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	52

<b>BAB IX</b>	<b>PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN</b>	
	<b>PROGRAM KEGIATAN .....</b>	<b>90</b>
<b>BAB X</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	.....	6
Tabel 3.1	Rencana dan Realisasi Input Tolak Ukur	.....	11
Tabel 3.2	Rencana dan Realisasi Output	.....	13
Tabel 3.3	Rencana dan Realisasi Outcome	.....	33
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Program	.....	55
Tabel 8.1	Capaian Kinerja Biro Pemerintahan T.A. 2021	.....	46
Tabel 8.2	Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan Dibandingkan Tahun Sebelumnya	.....	48
Tabel 8.3	Perbandingan Pencapaian Kinerja Biro Pemerintahan T.A 2021	.....	50
Tabel 8.4	Analisis Penggunaan Sumber Daya	.....	51
Tabel 8.5	Analisi Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target	.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Laporan Evaluasi Kinerja bagi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai wujud implementasi pengendalian manajemen yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sistem pengendalian ini sebagai mekanisme untuk mengukur sejauhmana pencapaian kinerja perencanaan tahunan terhadap Visi, Misi, Strategi dan Sasaran program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017 – 2022.

### B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran penyusunan laporan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2021 yang meliputi aspek Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Kinerja adalah :

- Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana bagi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Banten kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Provinsi Banten kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten kepada DPRD Provinsi Banten;
- Laporan Evaluasi Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

### C. Dasar Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Derah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 66).

## BAB II

### URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan, maka Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2020 hanya melaksanakan 1 Urusan Wajib yakni: (1) Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2020 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Seiring dengan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 serta berpedoman kepada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 5);
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66); dan
3. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/168-SK.PPKD/IX/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

maka, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada APBD-P Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 1 Urusan Wajib yang dilaksanakan melalui 2 program, 9 kegiatan, 45 keluaran dengan anggaran sebesar Rp. **2,802.281.000,-** yang dilaksanakan oleh 9 Satuan Unit Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi :

**Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan dilaksanakan melalui :**

**a. Program Tata Kelola Pemerintahan**

- |   |          |   |  |
|---|----------|---|--|
| 1 | Program  | : | Tata Kelola Pemerintahan   |
|   | Kegiatan | : | Tata Usaha Pemerintahan  |
|   | Keluaran | : | 1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset, dengan target 1 Kegiatan; |
|   |          |   | 2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan target 1 Kegiatan ;       |
|   |          |   | 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan target 1 Kegiatan;     |



4. Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah, dengan target 1 kegiatan;  
 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan target 1 Kegiatan.
- Hasil yang diharapkan : Capaian Nilai IKM Skala 3,2  
 Anggaran : Rp. 1.193.209.000,-

**b. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan**

- 2 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Daerah  
 Keluaran : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, dengan target 5 Dokumen;  
 2. Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekne Kerjasama Daerah, dengan target 5 Dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2020.  
 Anggaran : Rp. 362.000.000,-
- 3 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri  
 Keluaran : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, dengan target 2 dokumen;  
 2. Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri, dengan target 1 Dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2021.  
 Anggaran : Rp. 110.000,-
- 4 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah  
 Keluaran : 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan target 1 dokumen;  
 2. Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten, dengan target 2 dokumen;  
 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan target 1 dokumen;  
 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan target 9 dokumen.

- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2020.
- Anggaran : Rp. 270.000.000,-
- 5 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Penataan Daerah Otonom  
 Keluaran : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah, dengan target 1 dokumen;  
 2. Penataan Daerah Otonom, dengan target 1 dokumen;  
 3. Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah, dengan target 2 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2021.
- Anggaran : Rp. 138.870.000,-
- 6 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  
 Keluaran : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, dengan target 1 dokumen;  
 2. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, dengan target 1 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2021.
- Anggaran : Rp. 130.000.000,-
- 7 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah  
 Keluaran : 1. Administrasi Batas Daerah, dengan target 2 dokumen;  
 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah, dengan target 2 dokumen.
- Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2021.
- Anggaran : Rp. 229.500.000,-

- 8 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan  
 Keluaran : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan, dengan target 1 dokumen;  
 2. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dengan target 4 dokumen;  
 Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2021.  
 Anggaran : Rp. 168.702.000,-
- 9 Program : Perumusan Kebijakan Pemerintahan  
 Kegiatan : Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan  
 Keluaran : 1. Administrasi Rupabumi, dengan target 1 dokumen;  
 2. Administrasi Kode dan Data Wilayah Admimitrasi Pemerintahan, dengan target 1 dokumen;  
 Hasil yang diharapkan : Persentase Keselarasan Kebijakan di Bidang Pemerintahan sebesar 75% tahun 2020.  
 Anggaran : Rp. 200.000.000,-

Rincian pelaksanaan program kegiatan yang diejawantahkan melalui pelaksanaan tolok ukur kegiatan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1  
 Perjanjian Kinerja  
 Tahun 2021

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Ketatausahaan Biro Pemerintahan	100%	Tata Usaha Pemerintahan	1.193.209.000,-
			1 dokumen	1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset	12.112.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			1 dokumen	2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	14.548.400,-
			1 dokumen	3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	655.888.600,-
			1 dokumen	4 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	466.610.000,-
			1 dokumen	5 Peningkatan Kapasitas Aparatur	44.050.000,-
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama daerah	100%	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	362.000.000,-
			5 Dokumen	1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	347.007.000,-
			1 Dokumen	2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	14.993.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama luar negeri	100%	Penyelenggaraan Kerjasama Luar negeri	110.000.000,-
			2 Dokumen	1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	110.000.000,-
			1 Dokumen	2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	0,-
		Jumlah bahan kebijakan di bidang pembakuan nama rupa bumi serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	100%	Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	200.000.000,-
			2 Dokumen	1 Administrasi Rupabumi	131.400.000,-
			2 Dokumen	2 Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi	68.600.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
				Pemerintahan	
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis Kabupaten Kota dalam rangka PATEN	100%	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	168.702.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan	36.899.000,-
			4 Dokumen	2 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan	131.803.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan di bidang Batas Daerah	100%	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	229.500.000,-
			2 Dokumen	1 Administrasi Batas Daerah	120.000.000,-
			2 Dokumen	2 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	109.500.000,-
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	270.000.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	20.401.200,-
			2 Dokumen	3 Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten	98.920.000,-
			1 dokumen	4 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	54.586.800,-
			9 Dokumen	5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	96.092.000,-

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis di bidang penataan daerah	100%	Penataan Daerah Otonom	138.870.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah	40.000.000,-
			1 Dokumen	2 Penataan Daerah Otonom	69.300.000,-
			2 Dokumen	3 Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah	29.570.000,-
		Jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah dan DPRD	100%	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	130.000.000,-
			1 Dokumen	1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	8.280.000,-
			1 Dokumen	2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	121.720.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2021</b>					<b>2.802.281.000 -</b>

## BAB III

### RENCANA DAN REALISASI KINERJA

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja pelaksanaan Program Kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

#### 1. Rencana dan Realisasi Input

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro Pemerintahan tahun 2021 meliputi :

##### A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan 1 Kegiatan yakni Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan mencapai kinerja sebesar 71.51% atau Rp. 853.232.370,- atau dari target yang telah ditetapkan. Dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan 8 Kegiatan yakni Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja sebesar 60.45% atau Rp. 972.645.880,-.

##### B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 853.232.370,- atau 71.51% dari target yang telah ditetapkan
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai Kinerja sebesar Rp. 972.645.880,- atau 60.45% dari target yang telah ditetapkan;

Rincian realisasi kinerja input sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Rencana dan Realisasi Input Tolok Ukur

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	<b>1.193.209.000</b>	<b>853.232.370</b>	<b>71.51</b>
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	655.888.600	643.797.451	98.16
		2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	466.610.000	186.670.119	40.01
		3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	12.112.000	8.464.800	69.89
		4 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan	14.548.400	13.000.000	89.36
		5 Peningkatan Kapasitas Aparatur	44.050.000	1.300.000	2.95
2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>1.609.072.000</b>	<b>972.645.880</b>	<b>60.45</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	347.007.000	243.250.500	70.10
		2 Penyusunan Perumuan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	14.993.000	141.000	0.94
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>110.000.000</b>	<b>96.337.000</b>	<b>87.58</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	110.000.000	96.337.000	87.58
		2 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri	0	0	0
		<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>270.000.000</b>	<b>167.767.200</b>	<b>62.14</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	20.401.200	11.891.200	58.29
		2 Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten	98.920.000	92.632.000	93.64
		3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.586.800	37.762.000	69.18
		4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	96.092.000	25.482.000	26.52
		<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	<b>229.500.000</b>	<b>138.331.180</b>	<b>60.28</b>
		1 Administrasi Batas Daerah	120.000.000	51.294.000	42.75
		2 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	109.500.000	87.037.180	79.49



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>138.870.000</b>	<b>75.640.000</b>	<b>54.47</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah	40.000.000	37.710.000	94.28
		2 Penataan Daerah Otonom	69.300.000	17.800.000	25.69
		3 Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah	29.570.000	20.130.000	68.08
		<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>130.000.000</b>	<b>74.589.500</b>	<b>57.38</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	8.280.000	8.133.000	98.22
		2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	121.720.000	66.456.500	54.60
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>168.702.000</b>	<b>82.536.000</b>	<b>48.92</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan	36.702.000	82.536.000	48.92
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	131.803.000	78.076.000	59.24
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>94.194.000</b>	<b>47.10</b>
		1 Administrasi Rupabumi	131.400.000	85.194.000	64.84
		2 Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten	68.600.000	9.000.000	13.12

a. Rencana dan Realisasi Output

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 96.88% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Capaian Keuangan sebesar 65,16% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD,

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 96.88 %;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 100%;
2. Program Perumusam Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja mencapai kinerja sebesar 93.75%.

Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Rencana dan Realisasi Output

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
		<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	<b>100</b>
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran 2021 pada Biro Pemkesra sebanyak 1 dokumen meliputi : 1) Laporan bulanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• bulan Januari : target fisik 4.21% dan target keuangan 3.02% dengan realisasi fisik 4.45% dan realisasi keuangan 0.00%;</li> <li>• bulan Februari : target fisik 18.48% dan target keuangan 18.48% dengan realisasi fisik 14.79% dan realisasi keuangan 12.91%;</li> <li>• bulan Maret : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 23.33% dan realisasi keuangan 17.55%;</li> <li>• Bulan April : target fisik 45.94% dan target keuangan 45.94% dengan realisasi fisik 26.99% dan realisasi keuangan 22.17%;</li> </ul>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• bulan Mei : target fisik 55.53% dan target keuangan 55.53% dengan realisasi fisik 27.86% dan realisasi keuangan 30.67%;</li> <li>• bulan Juni : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 34.96% dan realisasi keuangan 32.11%;</li> <li>• bulan Juli : target fisik 69.44% dan target keuangan 69.44% dengan realisasi fisik 39.91% dan realisasi keuangan 33.56%;</li> <li>• bulan Agustus : target fisik 75.18% dan target keuangan 75.18% dengan realisasi fisik 44.47% dan realisasi keuangan 38.43%;</li> <li>• bulan September : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.18% dengan realisasi fisik 67.08% dan realisasi keuangan 40.48%;</li> <li>• bulan Oktober : target fisik 91.39% dan target keuangan 91.39% dengan realisasi fisik 72.39% dan realisasi keuangan 45.35%;</li> <li>• November : target fisik 95.50% target keuangan 95.50% dengan realisasi fisik 82.19% dan realisasi keuangan 54.99%; dan</li> <li>• bulan Desember : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%;</li> </ul> <p>2) Laporan triwulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triwulan I : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 23.33% dan realisasi keuangan 17.55%;</li> <li>• Triwulan II : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 34.96% dan realisasi keuangan 32.11%;</li> <li>• Triwulan III : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.14 % dengan realisasi fisik 67.08% dan realisasi keuangan 40.48%; dan</li> <li>• Triwulan IV : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%.</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				3) Laporan semesteran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semester I : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 34.96% dan realisasi keuangan 32.11%; dan</li> <li>• Semester II: target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%.</li> </ul> 4) Laporan akhir tahun <ul style="list-style-type: none"> <li>• Target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%..</li> </ul>	
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebanyak 1 dokumen	100	Tersedianya kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang di laksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2021. Dengan pelaksanaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Biro Pemerintahan melalui sistem pengadaan langsung yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan pada Biro Pemerintahan;</li> <li>2. Penyediaan Surat Kabar/Majalah pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Februari 2020 selama 12 bulan;</li> <li>3. Penyediaan TV Cable pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Februari 2020selama 12 bulan;</li> <li>4. Penyediaan pengadaan untuk kebutuhan Biro Pemerintahan selama 12 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari s/d Desember 2021;</li> <li>5. Penyediaan kebutuhan makan dan minum rapat yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2021;</li> <li>6. Penyediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemkesra dengan mengundang instansi/perorangan di luar Biro</li> </ol>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2	100	<p>Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2021;</p> <p>7. Pemenuhan Jasa Tenaga Kerja Lapangan selama 12 bulan yang di mulai pada bulan Januari s/d Desember 2021;</p> <p>Tersusunnya laporan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2021 yang di laksanakan mulai bulan Oktober s/d Desember sebanyak 4 dokumen, yang bersisi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Bahan LAKIP 2021 sebanyak 1 dokumen;</li> <li>b. Penyusunan Bahan LKPj 2021 sebanyak 1 dokumen;</li> <li>c. Penyusunan Bahan LPPD 2021 sebanyak 1 dokumen;</li> <li>d. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.</li> </ol> </li> <li>2. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan sebanyak 7 dokumen, yang berisi antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Renja APBD Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan Desember 2020;</li> <li>b. Penyusunan Renja APBD-P Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020;</li> <li>c. Penyusunan DRPK tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan Desember 2020;</li> <li>d. Penyusunan RKA 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan November 2020;</li> <li>e. Penyusunan DPA 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Januari 2021;</li> <li>f. Penyusunan DPPA tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan September 2021; dan,</li> <li>g. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.</li> </ol> </li> </ol>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		3 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah sebanyak 1 Dokumen	100	3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Renja tahun 2020 sebanyak 2 dokumen, yang berisi antara lain : a. Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2020 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020; dan, b. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2020.  Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi baik kedalam dan keluar daerah pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.	100
		4 Peningkatan Kapasitas Aparatur sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan sebanyak 1 dokumen dengan memfasilitasi aparatur Pemerintah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang di selenggarakan oleh OPD - OPD penyelenggara yang mengundang Biro Pemerintahan	100
	<b>Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan</b>		<b>100</b>		<b>85.94</b>
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>100</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 5 dokumen	100	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Sebanyak 9 dokumen melalui pelaksanaan :  a. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 19 Februari 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan narasumber pada kegiatan tersebut Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Banten Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah tersebut adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Potensi Daerah Provinsi Banten;</p> <p>b. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 13 Februari 2020, Senin, 17 Februari 2021 dan Senin 2 Maret 2020 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten dan Universitas Indonesia, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pembangunan di Provinsi Banten;</p> <p>c. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Senin, 8 Juni 2021 dan Rabu 10 Juni 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 10 Orang dari Biro Pemerintahan, Biro Hukum Setda Provinsi Banten dan perwakilan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Pengembangan Potensi Daerah;</p> <p>d. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 26 November 2020 dan Jumat 27 November 2020 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 7 Orang dari Biro Pemkesra, Biro Hukum dan Inspektorat, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>e. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 November 2021 dan Jumat 13 November 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 20</p>	



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Orang OPD Provinsi Banten, PT. BGD dan PT. Bank Banten, , dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Development Tahun Anggaran 2020;</p> <p>f. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Senin, 4 November 2021 dan Kamis, 12 November 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten dan Polda Banten, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Integrasi Closed Circuit Television (CCTV) Kepolisian Daerah Banten Dengan Pemerintah Provinsi Banten;</p> <p>g. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 3 Desember 2021, Selasa, 8 Desember 2021 dan Jum'at, 22 Desember 2021 di Ruang Rapat Biro</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 15 Orang OPD Provinsi Banten dan PT. ABM (Perseroda), dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) Tahun Anggaran 2020;</p> <p>h. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada HariSelasa, 17 Maret 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten), dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten Kepala Biro PemerintahanSetda Provinsi Banten Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda ProvinsiBanten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;</p> <p>i. Rapat Evaluasi Kerjasama Daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, namun tidak dapat dilakanakan disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan adanya efisiensi anggaran, yang pada akhirnya kegiatan Evaluasi Kerjaama Daerah tidak dapat dilaksanakan.</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen pada bulan Desember 2021. Penyusunan kebijakan dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dengan peserta sebanyak 5 orang Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Output kegiatan adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.	100
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>100</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 dokumen	100	Terselenggaranya Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 dokumen antara lain : a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2021 bertempat di ruang rapat TIK Gd. Dinas Kominfo Provinsi Banten dengan menghadirkan 25 orang peserta yang berasal dari OPD Provinsi dan 32 orang berasal dari Kabupaten/Kota. Narasumber kegiatan rapat berasal dari Eselon III Kementerian Dalam Negeri, 2 orang dari Eselon II Daerah dan 1 orang yang berasal dari Eselon III daerah. Output yang dihasilkan adalah :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap OPD dalam melaksanakan atau merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Provinsi sesuai dengan SOP yang sudah di sahkan.</li> <li>• Diharapkan setiap tahapan pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan mempedomani SOP kerjasama luar negeri yang sudah di sesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>• Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya dapat dilakukan oleh Kela Daerah, Wakil Kepala</li> </ul>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat yang didapatkan adalah : 1). Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, 2). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 3). Peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah dan 4). Mewujudkan Inovasi untuk Pemerintah Daerah.</li> <li>• Persaratan perjalanan dinas Luar Negeri antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;</li> <li>- wajib didampingi pejabat administrasi/fungsional pada perangkat daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi dari tujuan perjalanan dinas itu sendiri;</li> <li>- Perjaanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;</li> <li>- Dapat didampingi pejabat administrasi/fungsional pada perangkat daerah terkait;</li> <li>- larangan perjananan dinas luar negeri : 1). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan ke Luar Negeri pada kondisi perjalanan ke luar negeri dilakukan secara bersamaan, 2). terjadi keruuhan atau gangguan keamanan, 3). terjadi bencana alam.</li> <li>- Tujuan Perjalanan Dina Luar Negeri : 1). Penjajakan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar, negeri, tindak lanjut kerjaama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; 2). mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran poteni dan budaya daerah; 3). kunjungan persahabatan; 4). pendidikan dan pelatihan; 5. study banding; 6. seminar; 7). Lokakarya; 8). Konferensi</li> </ul> </li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>promosi potensi daerah; 8). pertemuan internasional; 8). penandatanganan naskah kerjasama; 9). Narasumber/pembicara.</p> <p>- dokumen pendukung : 1). Surat Undangan/ surat balasan kunjungan dari Negara atau tempat yang dituju/ Surat konfirmasi dari KBRI setempat; 2). Kerangka Acuan Kerja / <i>Term of Reference</i>; 3). Salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran; 4). surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja, rincian biaya perjalanan dina; 5). jadwal pelaksanaan kegiatan dan 6). data peronil peserta;</p> <p>- pengesahan Perjanalan Dinas Luar Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekomendasi : dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang akan di adakan selanjutnya agar setiap OPD baik Provinsi maupun kabupaten/kota melampirkan draft kerjasama luar negeri yang akan dan sedang di laksanakan.</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Rapat Evaluai Kerjasama Luar Negeri (dengan tema Tata Cara Kerjaama Daerah dengan Pemerintahan Daerah dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri) yang di laksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 bertempat di ruang rapat TIK Gd. Dinas Kominfo Provinsi Banten dengan menghadirkan 25 orang peserta yang berasal dari OPD Provinsi dan 32 orang berasal dari Kabupaten/Kota. Narasumber kegiatan rapat berasal dari Eselon III Kementerian Dalam Negeri, 2 orang dari Eselon II Daerah dan 1 orang yang berasal dari Eselon III daerah. Output yang dihasilkan adalah :</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>a) hal penting yang dihasilkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. disamping itu Pemerintah Daerah dapat menjadi penerima manfaat atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pihak luar negeri yang nantinya akan bersifat penerus kerjasama Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</li> <li>• Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hendaknya berdasarkan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga kerjasama akan memberikan manfaat secara maksimal;</li> <li>• sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Infrastruktur, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skema <i>Public Private Partnership (PPP)</i> sebagai salah satu alternative skema pendanaan pembangunan yang melibatkan pihak swasta, namun bukanlah privatisasi tetapi pengelolaan asset melalui kensensi;</li> <li>• mitra pembangunan internasional yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia e cara umum memberikan program yang bersifat hibah. namun ada juga yang berupa pinjaman lunak guna mendukung pembangunan di</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri sebanyak 0 dokumen	0	kerjasama menjadi prioritas secara umum dari mitra pembangunan di luar negeri; <ul style="list-style-type: none"> <li>dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama daerah guna mendorong percepatan pembangunan di daerah.</li> </ul> Kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan dilakukan efisiensi anggaran di sebabkan Pandemi Covid-19.	0
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>50</b>
		1 Administrasi Rupabumi sebanyak 2 dokumen	100	Terlaksananya Administrasi Rupabumi sebanyak 2 dokumen, antara lain : 1. Pelaksanaan Inventarisasi dan Validasi Rupabumi di Provinsi Banten yang di laksanakan pada 1 Maret 2021 di Kabupaten Serang, Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan 7 (Tujuh) orang personel yang berasal dari Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten. Hasil yang di peroleh antara lain : a. Data rupabumi Warisan Budaya berupa Bunker, Pos Jaga, Klinik, Barak, Rumah Dokter, Stasiun, Makam dan tempat peribadatan; b. Data yang di peroleh bukan hanya bentuk fisik bangunan, namun juga asal usul serta sejarah di balik pendirian bangunan; c. Dimungkinkan untuk adanya rekomendasi berupa penelitian lanjutan terkait keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya baik dalam satu pulau maupun berbeda pulau atau di wilayah-wilayah lainnya.	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten sebanyak 2 dokumen	100	<p>2. Direncanakan akan dilaksanakan koordinasi ke DIY terkait dengan pelaksanaan Administrasi yang di laksanakan di DIY yang sudah lebih baik jika di bandingkan dengan daerah lainnya. Namun, akibat terkendala dengan Covid - 19 maka kegiatan tersebut tidak dapat di laksanakan.</p> <p>Terlaksananya administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen, antara lain :</p> <p>1. Tidak terlaksananya Rapat Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dengan mengundang peserta berjumlah 50 orang untuk memperoleh data terbaru Kode Data yang akan di bukukan kembali pada tahun 2021. Namun, karena dampak dari Covid-19 yang mengharuskan adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan ini tidak dapat di laksanakan</p> <p>2. Terlaksananya Cetak Buku Update Kode data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Banten yang direncanakan pada bulan September 2021 yang di dalamnya memuat Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terbaru di Provinsi Banten.</p>	50
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>80</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen melalui pelaksanaan jajak pendapat dari Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 6 November s/d 16 November 2021	100
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 4 dokumen	100	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrai Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 3 dokumen, antara lain : 1. Rapat Kerja Inovasi Pelayanan Kecamatan, yang di laksanakan pada 13 February	75



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>2021 dan 10 Maret 2021 di Ruang Rapat Lt. II Gd. KPD Terpadu dengan mengundang seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten. Narasumber dalam Rapat Kerja antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri,</li> <li>2. Kasi Wilayah II Subdit Kecamatan Kemendagri,</li> <li>3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;</li> </ol> <p>2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi langsung di Kelurahan di 8 Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten yang menghasilkan beberapa hal yang perlu untuk di sempurnakan dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan se-Provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan pada 24 November 2021 s/d 16 Desember 2021;</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan), dilaksanakan semenjak 4 Desember 2021 s/d 18 Desember 2021. Pelaksanaan kegiatan adalah dengan mendatangi langsung Kelurahan dan Kecamatan di 8 Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten, untuk dapat memperoleh data yang lebih akurat dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten. Hasil yang di peroleh dalam monitoring dan evaluasi adalah masih terdapatnya beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang membutuhkan peningkatan Pelayanannya, begitu juga dengan kelengkapan invrastruktur pelayanan yang tidak sedikit masih harus di tingkatkan kembali.</p> <p>4. Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan tidak dapat di laksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	<b>75</b>
		1 Administrasi Batas Daerah sebanyak 2 Kegiatan	100	Terlaksananya administrasi Batas Daerah sebanyak 1 dokumen antara lain : 1. pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten pada hari Selasa 18 Februari 2020 yang di laksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Lt. 2 Gedung SKPD Terpadu Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Kota Serang dengan peserta berjumlah 50 Orang (Dinas/Instansi terkait, Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Serang dan Kota Serang yang berbatasan) dan narasumber berasal dari Kasubdit Batas antar Daerah Wilayah I Kemendagri, Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Batas Daerah). output yang di harapkan adalah Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas Daerah antara Kabupaten Serang dan Kota Serang. 2. Rapat korrdinasi kedua tidak dapat di laksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19	50
		2 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah sebanyak 2 Kegiatan	100	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Pilar Batas Wilayah sebanyak 2 kegiatan, antara lain : 1. terlaksananya pembangunan pilar batas daerah Provinsi Banten sebanyak 8 pilar batas wilayah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta pada bulan Oktober s/d November 2021. 2. terlaksannya pemeliharaan pilar batas wilayah sebanyak 4 pilar batas antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Oktober s/d November 2021.	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 13 dokumen</b>	<b>100</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 13 dokumen</b>	<b>100</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya rumusan kebijakan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang diawali dengan koordinasi dan konsultasi baik dengan pihak Kementerian khususnya Kemendagri maupun dengan 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2021. Hasil yang di peroleh adalah rumusan kebijakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.	100
		2 Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten sebanyak 2 dokumen	100	Terlaksananya penyusunan LPPD dan IKK LPPD Provinsi Banten tahun 2020 sebanyak 2 dokumen berupa Buku LPPD dan Buku IKK LPPD. Penyusunan dilaksanakan semenjak bulan Januari s/d Maret 2020 yang di laksanakan pada Kantor Biro Pemerintahan setda Provinsi Banten. Pengumpulan dan penyusunan LPPD dan IKK LPPD Provinsi Banten diawali dengan pengumpulan data dari setiap OPD Provinsi Banten yang kemudian diolah hingga menghasilkan buku LPPD dan IKK LPPD Provinsi Banten 2020.	100
		3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	100	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebanyak 1 dokumen yang diawali dengan kegiatan Pra-LPPD Kab/Kota Se-Provinsi Banten pada bulan Juni s/d Agustus 2020, yang kemudian data-data tersebut di evaluasi hingga menghasilkann hasil evaluasi berupa rekomendasi-rekomendasi yang harus di laksanakan dan dipenuhi oleh Kab/Kota untuk kemudian mendapatkan penilaian dari tim evaluasi LPPD Provinsi Banten.	100
		4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 9 Dokumen	100	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Oktober 2020 yang di laksanakan di ruang Rapat Biro Pemerintahan Lt. II SKPD Terpadu. Kegiatan di laksanakan dengan pemanggilan tim penyusun LPPD dan IKK LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten untuk mendapatkan pembekalan dan evaluasi hingga penilaian dari Tim	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				Nasional Penilai LPPD. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa penilaian LPPD dan IKK LPPD dari Kab/Kota se-Provinsi Banten.	
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>100</b>	<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>50</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah sebanyak 1 dokumen terkait dengan Laporan pelaksanaan Penetapan Standart Pelayanan Minimal tahun 2019 yang di rumuskan dan dievaluai pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan, Gd. SKPD terpadu lantai II. Peserta yang hadir berjumlah 48 orang dari OPD Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi dan BAPPEDA Kab/Kota di Provinsi Banten, dengan narasumber berjumlah 3 orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.	100
		2 Penataan Daerah Otonom sebanyak 1 Dokumen	100	Kegiatan penataan daerah otonom tidak dapat dilaksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19	0
		3. Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah sebanyak 2 Dokumen	100	<p>Terselenggaranya Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terlaksananya rekon data asset Kabupaten / Kota se Provinsi Banten, begitupula asset yang di miliki dan di kelola oleh Provinsi Banten yang di laksanakan pada bulan Januari 2021, yang menghasilkan data asset yang di miliki dan dikelola oleh Provinsi Banten hingga Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, juga data asset yang dimilikii oleh Pemerintah Pusat.</li> <li>2. Untuk target kedua yakni terkait dengan rapat penyelesaian pelimpahan asset yang di rencanakan dilaksanakan pada bulan Agustus tidak dapat di laksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19.</li> </ol>	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>100</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Administrasi Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan pelaksanaannya khususnya mengenai tata cara dan pelaksanaan seluruh administrasi terkait Kepala Daerah. Kegiatan di laksanakan pada bulan Juni s/d November 2021 di seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten. Hal ini bertujuan terbangunnya sinkronisasi antara Kabupaten / Kota dengan Provinsi, yang pada akhirnya mampu membangun sinergisitas yang baik.	100
		2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Adminitrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II. Peserta yang hadir dalam kegiatan berjumlah 50 orang yang berasal dari OPD Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten serta perwakilan OPD Provinsi Banten. Narasumber kegiatan terdiri atas 2 (Dua) orang setara eselon III Kementerian Dalam Negeri dan 1 (Satu) orang setara Eselon II Daerah. Output kegiatan pelaksanaan rapat adalah dapat memberikan pemahaman dan penekanan kepada kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan izin alasan penting bagi kepala daerah dan DPRD sehingga dapat terlaksananya tertib administrasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dalam hal ini kemendagri dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Di rencanakan sebelumnya bahwa kegiatan akan di laksanakan dua kali rapat koordinasi, namun akibat terjadinya pandemic Covid - 19 yang kemudian dilakukan efisiensi anggaran, maka kegiatan kedua tidak dapat dilaksanakan, dan hanya melalui teleconverence.	100

## d. Rencana dan Realisasi Outcome

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan fokus kepada hasil yang dicapai sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pengukuran kinerja outcome pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 95.97 % dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

## A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 92.97 %;

## B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai kinerja 100%;
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja 85.94%.

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Rencana dan Realisasi Outcome

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN		100		100
Tata Usaha Pemerintahan	Meningkatnya Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten sebesar 100% tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 2. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan; 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur.	100	Meningkatnya Ketersediaan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten sebesar 100% tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; 2. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah; 3. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; 4. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan; 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur.	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN</b>		<b>100</b>		<b>85.94</b>
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebesar 100% tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah;	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebesar 75% tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah;	100
Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Sebesar 100% Tahun 2020 Melalui Pelaksanaan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 2. -	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Sebesar 67% Tahun 2020 Melalui Pelaksanaan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri; 2. -	100
Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Jumlah Bahan Kebijakan di Bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi Serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Administrasi Rupabumi; 2. Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	100	Meningkatnya Jumlah Bahan Kebijakan di Bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi Serta Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Administrasi Rupabumi; 2. Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.	100
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kab./Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan;  2. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan.	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis Kab./Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebesar 87.50% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan;  2. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	87.50
Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan di Bidang Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Administrasi Batas Daerah; 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Batas Daerah.	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan di Bidang Batas Daerah sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Administrasi Batas Daerah; 2. Pembangunan dan Pemeliharaan Batas Daerah.	100
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan :	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan :	100

PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA		REALISASI	
	TARGET OUTCOMES	%	TARGET OUTCOMES	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah; 2. Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten; 3. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota; 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		1. Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah; 2. Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten; 3. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota; 4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
Penataan Daerah Otonom	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Penataan Daerah sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah; 2. Penataan Daerah Otonom; 3. Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah;	100	Meningkatnya Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Penataan Daerah sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah; 2. Penataan Daerah Otonom; 3. Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah	100
Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan; 2. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.	100	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Bagi Pejabat Negara/Daerah dan DPRD sebesar 100% Tahun 2020 melalui pelaksanaan : 1. Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan; 2. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.	100

#### e. Rencana dan Realisasi Capaian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau Unit SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan mempedomani kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang diimplementasikan kedalam perencanaan tahunan (RENJA) yang diuraikan dalam kegiatan dan anggaran. Kesesuaian antara kegiatan dan anggaran tahunan dengan program yang dilaksanakan berpengaruh terhadap capaian kinerja program jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja capaian program pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 92.97% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :



A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 92.97%;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 100%;
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja 85.94%

Rincian realisasi kinerja outcome sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Rencana dan Realisasi Capaian Program

PROGRAM	RENCANA		REALISASI	
	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%	TARGET CAPAIAN PROGRAM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Tata kelola Pemerintahan	Capaian Nilai IKM skala 3.2 capaian kinerja kegiatan : 1. Kegiatan tata Usaha Biro Pemerintahan.	100	Capaian Nilai IKM skala 3.2 capaian kinerja kegiatan : 1. Kegiatan tata Usaha Biro Pemerintahan.	100
Program Prumusan Kebijakan Pemerintahan	Capaian % Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 3. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 5. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 6. Penataan Daerah Otonom; 7. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 8. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.	100	Capaian % Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintahan melalui capaian kinerja kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah; 2. Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 3. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah; 4. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 5. Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi pemerintahan; 6. Penataan Daerah Otonom; 7. Penataan Wilayah Administrasi dan batas Daerah, dan; 8. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.	85.94

## **BAB IV**

### **REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2021**

Biro pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak melaksanakan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 1 Angka 11 yang menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan dengan pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Akan tetapi, pada tahun 2021 disebabkan terjadinya fenomena Pandemi Covid - 19 mengakibatkan pada tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian lain tidak jadi melaksanakan Dekonsentisasi maupun Tugas Pembantuan, yang pada akhirnya kegiatan di fokuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat darurat tersebut yang di harapkan dapat di selesaikan pada tahun 2021. Hal ini senada dengan peraturan yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

## BAB VI

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### 1. Pembinaan Batas Wilayah

##### 1. Sengketa Batas Wilayah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021 terjadi sengketa batas wilayah antara Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak yang hingga saat ini laporan hasil fasilitasi oleh Provinsi belum ada laporan kembali dari pihak Kabupaten Lebak maupun Kabupaten Pandeglang.

Upaya penyelesaian batas antara kedua belah pihak di lakukan dengan upaya-upaya antara lain :

1. Memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang, yang di laksanakan di Ruang Kepala Biro Pemerintahan pada tanggal 15 Juli 2021. Mewakili Kab. Lebak adalah Asda I Kab.Lebak, sedangkan Kab. Pandeglang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Kaubbag Bina Wilayah. Sedangkan dari Biro Pemerintahan yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Kasubbag Bina Wilayah.  
Rekomendasi yang di telurkan dalam pertemuan tersebut adalah melakukan audiensi dengan Badan Informasi dan Geospasial Republik Indonesia dan melakukan pelacakan batas wilayah antara Kab.Lebak dengan Kab. Pandeglang.
2. Tanggal 29 Juli 2021, dilakukan audiensi dengan pihak BIG untuk melihat batas wilayah antara Kab. Pandeglang dengan Kab. Lebak yang terutama terfokus pada wilayah-wilayah yang di permasalahan.
3. Kemudian dilakukan pelacakan batas wilayah pada tanggal 27 Oktober 2021, namun baru 1 Desa yang berbatasan, Desa Mogana Kab. Pandeglang yang berbatasan degan Desa Sukaharja Kab. Lebak. Menyusul kemudian beberapa desa lainnya yang berbatasan.

##### 2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

###### a) Jumlah Pegawai :

Jumlah pegawai yang terlibat adalah 4 (empat) orang pada Sub Bagian Bina Wilayah

###### b) Kualifikasi Pendidikan :

- 1 (satu) orang Sarjana Ilmu Pemerintahan;
- 1 (satu) orang Sarjana Ilmu Administrasi Negara;
- 1 (satu) orang SLTA.

###### c) Pangkat dan Golongan

- 1 (satu) orang Penata Tingkat I (III/d)
- 2 (dua) orang Penata Muda (III/a)
- 1 (satu) orang Pengatur Muda (II/a)

## **BAB VII**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Biro pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 2021, dikarenakan Biro Pemerintahan bukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi pelayanan, disamping itu juga Biro – Biro adalah sub unit dari OPD Sekretariat Daerah. Jikapun dipaksakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan, maka ukuran pelayanannya akan sangat ambigu.

## BAB VIII

### AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

#### 8.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada tahun 2020 telah menetapkan Target Kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Biro Pemerintahan setda Provinsi Banten.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten tahun 2021:

#### Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Biro dengan Sekretari Daerah Provinsi Banten)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;</li> <li>- Presentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administratif perangkat daerah;</li> <li>- presentase terwujudnya peningkatan kapaitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;</li> <li>- presentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD</li> </ul>	<p style="text-align: center;">%</p> <p style="text-align: center;">%</p> <p style="text-align: center;">%</p> <p style="text-align: center;">%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase Realisasi Kebijakan Kerjasama Pemerintahan;</li> <li>- Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten</li> </ul>	<p style="text-align: center;">%</p> <p style="text-align: center;">%</p>	<p>100</p> <p>100</p>

## Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bagian Kerjasama dengan Kepala Biro Pemerintahan)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;</li> <li>- presentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah</li> <li>- presentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKP</li> <li>- Presentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tuga dan fungsi SKPD</li> </ul>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Presentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	%	100

## Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Presentase realisasi kebijakan adminitrasi pemerintahan dan otonomi daerah	%	100

## Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Presentase realisasi kebijakan adminitrasi kewilayahan	%	100

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tata Usaha Pemerintahan	Terusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	Kegiatan	1
		Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan	1
		Terlaksananya pengadaan barang dan jasa perkantoran	Kegiatan	1
		Terlaksananya koordinasi ke dalam dan ke luar daerah	Kegiatan	1
		Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur	Kegiatan	1

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	Dokumen	1
		Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama daerah	Dokumen	5

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	Tersusunnya rumusan kebijakan teknis kerjasama luar negeri	Dokumen	0
		Terselenggaranya kerjasama luar negeri	Dokumen	2

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Penataan Daerah Otonom)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penataan Daerah Otonom	Tersusunnya rancangan kebijakan penataan daerah	Dokumen	1
		Terlaksananya penataan daerah otonom	Dokumen	1
		Terlaksananya penyelesaian permasalahan asset pemerintahan daerah	Dokumen	2



## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Tersusunnya rumusan kebijakan evaluasi kinerja pemerintahan daerah	Dokumen	1
		Terusunnya LPPD dan IKK Provinsi Banten	Dokumen	2
		Terselenggaranya pembinaan penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen	9

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Tersusunnya rancangan kebijakan administrasi pemerintahan	Dokumen	1
		Terlaksananya administrasi kepala daerah dan DPRD	Dokumen	1

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Batas Daerah)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Terlaksananya Administrasi Batas Daerah	Kegiatan	2
		Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah	Kegiatan	2

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Administrasi Rupabumi)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya administrasi Rupabumi	Dokumen	4
		Terlaksananya Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten	Dokumen	2

## Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Administrasi Bina Kecamatan)

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya rancangan kebijakan teknis Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	1
		Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	4

## 8.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 pada dasarnya terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanaan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai. Disebut juga sebagai realisasi output.

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 98.47% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% meliputi :

### A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan

Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 91.41 %;

#### B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 100%;
2. Program Perumusam Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja mencapai kinerja sebesar 82.81%

Berikut disampaikan capaian kinerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 :

Tabel 8.1  
Capaian Kinerja Biro Pemerintahan  
T.A 2020

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	DPA PERUBAHAN TAHUN 2020		REALISASI	%
		KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6
1	Tata Kelola Pemerintahan	<b>NILAI IKM (SKALA)</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>100%</b>
		<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	100%	100%	100%
		1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		4 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		5 Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	DPA PERUBAHAN TAHUN 2020		REALISASI	%
		KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Presentase Keselarasan kebijakan di bidang pemerintahan (%)	<b>100 %</b>		<b>82.81 %</b>
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>			<b>100 %</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	100
		2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar negeri</b>			<b>100 %</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	100
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>			<b>50 %</b>
		1 Administrasi Rupabumi	4 Dokumen	2 Dokumen	50
		2 Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	1 Dokumen	50
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>87.50%</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan	4 Dokumen	3 Dokumen	75

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	DPA PERUBAHAN TAHUN 2021		REALISASI	%
		KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6
		<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>			<b>75 %</b>
		1 Administrasi Batas Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50
		2 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>			<b>100 %</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2 Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100
		4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>			<b>50 %</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2 Penataan Daerah Otonom	1 Dokumen	0 Dokumen	0
		3 Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50
		<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>			<b>100 %</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100

### 8.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 pada dasarnya terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanaan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai. Disebut juga sebagai realisasi output.

Tabel 8.2

Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan Dibandingkan Tahun Sebelumnya

T.A. 2020

NO	PROGRAM / SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	REALISASI 2020	REALISASI 2019
1	2	3	6	6
1	Tata Kelola Pemerintahan	<b>NILAI IKM (SKALA)</b>  Tata Usaha Pemerintahan	<b>100%</b>  100%	<b>80%</b>  80%
2	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	<b>Presentase Keselarasan kebijakan di bidang pemerintahan (%)</b>  Penyelenggaraan Kerjasama Daerah  Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri  Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan  Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah  Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah  Penataan Daerah Otonom  Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	<b>82.81 %</b>  100 %  100 %  50 %  87.50 %  75 %  100 %  50 %  100 %	<b>90.35 %</b>  75 %  77.78 %  100 %  100 %  80 %  100 %  90 %  100 %

## 8.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berikut disampaikan capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah :

Tabel 8.3

Perbandingan Pencapaian Kinerja Biro Pemerintahan

T.A. 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	
				TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efien	Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan : Skala)	3,3	3.3
2.	Meningkatnya Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Presentase Keselarasan kebijakan di bidang pemerintahan (%)	75%	82.81 %

## 8.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat juga di sebut sebagai rencana dan realisasi input.

Input (struktur), ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Input dalam kerangka perencanaan program kegiatan berorientasi kepada capaian realisasi belanja. Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan pada Biro Pemerintahan tahun 2020 meliputi :

### A. Per Urusan Wajib

Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan 1 Kegiatan yakni Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan mencapai kinerja sebesar 71.51% atau Rp. 853.232.370,- atau dari target yang telah ditetapkan. Dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan 8 Kegiatan yakni Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja sebesar 60.45% atau Rp. 972.645.880,-.

## B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 853.232.370,- atau 71.51% dari target yang telah ditetapkan
2. Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan mencapai Kinerja sebesar Rp. 972.645.880,- atau 60.45% dari target yang telah ditetapkan;

Rincian realisasi kinerja input sebagai berikut :

Tabel 8.4  
Analisis Penggunaan Sumber Daya

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		<b>1.193.209.000</b>	<b>853.232.370</b>	<b>71.51</b>
		<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	<b>1.193.209.000</b>	<b>853.232.370</b>	<b>71.51</b>
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	655.888.600	643.797.451	98.16
		2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	466.610.000	186.670.119	40.01
		3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	12.112.000	8.464.800	69.89
		4 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan	14.548.400	13.000.000	89.36
5 Peningkatan Kapasitas Aparatur	44.050.000	1.300.000	2.95		
2	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan		<b>1.609.072.000</b>	<b>972.645.880</b>	<b>60.45</b>
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>362.000.000</b>	<b>243.250.500</b>	<b>67.20</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	347.007.000	243.250.500	70.10
		2 Penyusunan Perumuan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah	14.993.000	141.000	0.94
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>110.000.000</b>	<b>96.337.000</b>	<b>87.58</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	<b>110.000.000</b>	<b>96.337.000</b>	<b>87.58</b>
		2 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri	0	0	0
		<b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>270.000.000</b>	<b>167.767.200</b>	<b>62.14</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	20.401.200	11.891.200	58.29
		2 Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten	98.920.000	92.632.000	93.64
3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.586.800	37.762.000	69.18		
4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	96.092.000	25.482.000	26.52		



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN TOLOK UKUR	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		<b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b>	<b>229.500.000</b>	<b>138.331.180</b>	<b>60.28</b>
		1 Administrasi Batas Daerah	120.000.000	51.294.000	42.75
		2 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	109.500.000	87.037.180	79.49
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>138.870.000</b>	<b>75.640.000</b>	<b>54.47</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah	40.000.000	37.710.000	94.28
		2 Penataan Daerah Otonom	69.300.000	17.800.000	25.69
		3 Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah	29.570.000	20.130.000	68.08
		<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>130.000.000</b>	<b>74.589.500</b>	<b>57.38</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	8.280.000	8.133.000	98.22
		2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	121.720.000	66.456.500	54.60
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>168.702.000</b>	<b>82.536.000</b>	<b>48.92</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Tekni Kecamatan dan Kelurahan	36.702.000	82.536.000	48.92
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan	131.803.000	78.076.000	59.24
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>94.194.000</b>	<b>47.10</b>
		1 Administrasi Rupabumi	131.400.000	85.194.000	64.84
		2 Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten	68.600.000	9.000.000	13.12

### 8.6 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 pada dasarnya terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanaan suatu kegiatan harus ditentukan dahulu target yang akan dicapai. Disebut juga sebagai realisasi output.

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dengan hasil pencapaian sebesar 96,88% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dan Capaian Keuangan sebesar 65,16% meliputi :

A. Per Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Administrasi Pemerintahan melalui pelaksanaan Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan Tata Usaha Pemerintahan dan Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri, Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Administrasi Rupabumi Dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah mencapai kinerja 96,88 %;

B. Per Program

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja 100%;
2. Program Perumusam Kebijakan Pemerintahan mencapai kinerja mencapai kinerja sebesar 93,75%.

Rincian realisasi kinerja output sebagai berikut :

Tabel 8.5  
Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	<b>Program Tata Kelola Pemerintahan</b>		<b>100</b>		<b>100</b>
		<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Tata Usaha Pemerintahan</b>	<b>100</b>
		1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset sebanyak 1 dokumen	100	Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun anggaran 2021 pada Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen meliputi : 5) Laporan bulanan <ul style="list-style-type: none"> <li>• bulan Januari : target fisik 4.21% dan target keuangan 3.02% dengan realisasi fisik 4.45% dan realisasi keuangan 0.00%</li> <li>• bulan Februari : target fisik 18.48% dan target keuangan 18.48% dengan realisasi fisik 14.79% dan realisasi keuangan 12.91%;</li> <li>• bulan Maret : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 23.33% dan realisasi keuangan 17.55%;</li> </ul>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulan April : target fisik 45.94% dan target keuangan 45.94% dengan realisasi fisik 26.99% dan realisasi keuangan 22.17%;</li> <li>• bulan Mei : target fisik 55.53% dan target keuangan 55.53% dengan realisasi fisik 27.86% dan realisasi keuangan 30.67%;</li> <li>• bulan Juni : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 34.96% dan realisasi keuangan 32.11%;</li> <li>• bulan Juli : target fisik 69.44% dan target keuangan 69.44% dengan realisasi fisik 39.91% dan realisasi keuangan 33.56%;</li> <li>• bulan Agustus : target fisik 75.18% dan target keuangan 75.18% dengan realisasi fisik 44.47% dan realisasi keuangan 38.43%;</li> <li>• bulan September : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.18% dengan realisasi fisik 67.08% dan realisasi keuangan 40.48%;</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• bulan Oktober : target fisik 91.39% dan target keuangan 91.39% dengan realisasi fisik 72.39% dan realisasi keuangan 45.35%;</li> <li>• bulan November : target fisik 95.50% dan target keuangan 95.50% dengan realisasi fisik 82.19% dan realisasi keuangan 54.99%; dan</li> <li>• bulan Desember : target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%;</li> </ul> <p>6) Laporan triwulanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triwulan I : target fisik 33.37% dan target keuangan 33.37% dengan realisasi fisik 23.33% dan realisasi keuangan 17.55%;</li> <li>• Triwulan II : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 34.96% dan realisasi keuangan 32.11%;</li> <li>• Triwulan III : target fisik 85.14% dan target keuangan 85.14 % dengan realisasi fisik 67.08% dan realisasi keuangan 40.48%; dan</li> <li>• Triwulan IV : target fisik</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%.</p> <p>7) Laporan semesteran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Semester I : target fisik 60.86% dan target keuangan 60.86% dengan realisasi fisik 34.96% dan realisasi keuangan 32.11%;; dan</li> <li>Semester II: target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%.</li> </ul> <p>8) Laporan akhir tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Target fisik 100% dan target keuangan 100% dengan realisasi fisik 98.53% dan realisasi keuangan 65.16%..</li> </ul>	
		1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebanyak 1 dokumen	100	<p>Tersedianya kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang di laksanakan pada Bulan Januari s/d Desember 2021. Dengan pelaksanaan antara lain:</p> <p>1. Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Biro Pemerintahan melalui sistem pengadaan langsung</p>	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan pada Biro Pemkesra;</p> <p>2. Penyediaan Surat Kabar/Majalah pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Februari 2021 selama 12 bulan;</p> <p>3. Penyediaan TV Cable pada Biro Pemerintahan yang dilaksanakan setiap bulan yang dimulai pada bulan Februari 2021 selama 12 bulan;</p> <p>4. Penyediaan pengadaan untuk kebutuhan Biro Pemerintahan selama 12 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari s/d Desember 2021;</p> <p>5. Penyediaan kebutuhan makan dan minum rapat yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2021;</p> <p>6. Penyediaan kebutuhan makan dan minum kegiatan yang terutama dilaksanakan oleh internal Biro Pemerintahan dengan mengundang instansi/perorangan di luar</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2	100	<p>Biro Pemerintahan yang di laksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2021;</p> <p>7. Pemenuhan Jasa Tenaga Kerja Lapangan selama 12 bulan yang di mulai pada bulan Januari s/d Desember 2021;</p> <p>Tersusunnya laporan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan sebanyak 1 dokumen antara lain :</p> <p>1. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 yang di laksanakan mulai bulan Oktober s/d Desember sebanyak 4 dokumen, yang bersisi antara lain :</p> <p>a. Penyusunan Bahan LAKIP 2010 sebanyak 1 dokumen;</p> <p>b. Penyusunan Bahan LKPj 2021 sebanyak 1 dokumen;</p> <p>c. Penyusunan Bahan LPPD 2021 sebanyak 1 dokumen;</p> <p>d. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.</p> <p>2. Penyusunan Perencanaan</p>	100



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Program dan Kegiatan sebanyak 7 dokumen, yang berisi antara lain :</p> <p>a. Penyusunan Renja APBD Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan Desember 2020;</p> <p>b. Penyusunan Renja APBD-P Tahun 2020 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020;</p> <p>c. Penyusunan DRPK tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang di laksanakan pada bulan Desember 2020;</p> <p>d. Penyusunan RKA 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan November 2010;</p> <p>e. Penyusunan DPA 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Januari 2020;</p> <p>f. Penyusunan DPPA tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan September 2020; dan,</p> <p>g. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.</p> <p>3. Penyusunan Pengendalian</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				dan Evaluasi Renja tahun 2021 sebanyak 2 dokumen, yang berisi antara lain : a. Penyusunan Evaluasi Renja Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021; dan, b. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan / Proceeding sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021.	
		3 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah sebanyak 1 Dokumen	100	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi baik kedalam dan keluar daerah pada Biro Pemerintahan selama 12 Bulan yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Desember 2020.	100
		4 Peningkatan Kapasitas Aparatur sebanyak 1 dokumen	100	Trlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan sebanyak 1 dokumen dengan memfasilitasi aparatur Pemerintah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang di selenggarakan oleh OPD - OPD penyelenggara yang mengundang Biro Pemerintahan	100
	<b>Program Perumusan</b>		<b>100</b>		<b>85.94</b>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
	<b>Kebijakan Pemerintahan</b>				
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Daerah</b>	<b>100</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak 5 dokumen	100	Terlaksananya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Sebanyak 9 dokumen melalui pelaksanaan : a. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 19 Februari 2020 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan narasumber pada kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah tersebut adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Islam Negeri	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Potensi Daerah Provinsi Banten;</p> <p>b. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 13 Februari 2021, Senin, 17 Februari 2021 dan Senin 2 Maret 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten dan Universitas Indonesia, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Indonesia</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pembangunan di Provinsi Banten;</p> <p>c. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Senin, 8 Juni 2021 dan Rabu 10 Juni 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 10 Orang dari Biro Pemkesra, Biro Hukum Setda Provinsi Banten dan perwakilan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Pengembangan Potensi Daerah;</p> <p>d. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 26 November 2021 dan Jumat 27 November 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 7 Orang dari Biro Pemkesra, Biro Hukum dan Inspektorat, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten tentang Pelaksanaan Pengawasan</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>e. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 11 November 2021 dan Jumat 13 November 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 20 Orang OPD Provinsi Banten, PT. BGD dan PT. Bank Banten, , dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Banten Global Development tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Banten Global Development Tahun Anggaran 2021;</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>f. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Senin, 4 November 2021 dan Kamis, 12 November 2021 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten dan Polda Banten, dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten tentang Integrasi Closed Circuit Television (CCTV) Kepolisian Daerah Banten Dengan Pemerintah Provinsi Banten;</p> <p>g. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang</p>	



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>dilaksanakan pada Hari Kamis, 3 Desember 2021, Selasa, 8 Desember 2021 dan Jum'at, 22 Desember 2020 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 15 Orang OPD Provinsi Banten dan PT. ABM (Perseroda), dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.</p> <p>Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Tersusunnya Draft Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten Kepada PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) Tahun Anggaran 2020;</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>h. Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 17 Maret 2020 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II dengan peserta berjumlah 30 Orang Perwakilan OPD Provinsi Banten), dengan narasumber pada kegiatan tersebut adalah Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Kepala Bagian Kerjasama Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten. Output dari rapat tim Koordinasi Kerjasama Daerah adalah Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;</p> <p>i. Rapat Evaluasi Kerjasama Daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan adanya efisiensi anggaran, yang pada akhirnya kegiatan Evaluasi Kerjasama Daerah tidak dapat dilaksanakan.</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah sebanyak 1 dokumen pada bulan Desember 2020. Penyusunan kebijakan dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dengan peserta sebanyak 5 orang Bagian Kerjasama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. Output kegiatan adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.	100
		<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri</b>	<b>100</b>
		1 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 dokumen	100	Terselenggaranya Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 dokumen antara lain : a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri yang di laksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 bertempat di ruang rapat TIK Gd. Dinas Kominfo Provinsi Banten dengan menghadirkan 25 orang peserta yang berasal dari OPD Provinsi dan 32 orang berasal dari Kabupaten/Kota. Narasumber kegiatan	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>rapat berasal dari Eselon III Kementerian Dalam Negeri, 2 orang dari Eselon II Daerah dan 1 orang yang berasal dari Eselon III daerah. Output yang dihasilkan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap OPD dalam melaksanakan atau merencanakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Provinsi sesuai dengan SOP yang sudah di sahkan.</li> <li>• Diharapkan setiap tahapan pelaksanaan kerjasama luar negeri dengan mempedomani SOP kerjasama luar negeri yang sudah di sesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>• Perjalanan Dinas Luar Negeri hanya dapat dilakukan oleh Kela Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.</li> <li>• Manfaat yang didapatkan adalah : 1). Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, 2). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 3). Peningkatan kualitas daerah dan</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>mewujudkan kesejahteraan daerah dan 4). Mewujudkan Inovasi untuk Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan perjalanan dinas Luar Negeri antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>-Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;</li> <li>-wajib didampingi pejabat administrasi/fungsional pada perangkat daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi dari tujuan perjalanan dinas itu sendiri;</li> <li>-Perjaanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;</li> <li>-Dapat didampingi pejabat administrasi/fungsional pada perangkat daerah terkait;</li> <li>-larangan perjananan dinas luar negeri : 1). Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan ke Luar Negeri pada kondisi perjalanan ke luar negeri dilakukan secara bersamaan, 2).</li> </ul> </li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>terjadi keruahan atau gangguan keamanan, 3). terjadi bencana alam.</p> <p>-Tujuan Perjalanan Dina Luar Negeri : 1). Penjajakan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar, negeri, tindak lanjut kerjaama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri; 2). mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran poteni dan budaya daerah; 3). kunjungan persahabatan; 4). pendidikan dan pelatihan; 5. study banding; 6. seminar; 7). Lokakarya; 8). Konferensi promosi potensi daerah; 8). pertemuan internasional; 8). penandatanganan naskah kerjasama; 9). Narasumber/pembicara.</p> <p>-dokumen pendukung : 1). Surat Undangan/ surat balasan kunjungan dari Negara atau tempat yang dituju/ Surat konfirmasi dari KBRI setempat; 2). Kerangka Acuan Kerja / <i>Term of</i></p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p><i>Reference;</i> 3). Salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran; 4). surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja, rincian biaya perjalanan dina; 5). jadwal pelaksanaan kegiatan dan 6). data peronil peserta;</p> <p>- pengesahan Perjanalan Dinas Luar Negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi : dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang akan di adakan selanjutnya agar setiap OPD baik Provinsi maupun kabupaten/kota melampirkan draft kerjasama luar negeri yang akan dan sedang di laksanakan.</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan Rapat Evaluai Kerjasama Luar Negeri (dengan tema Tata Cara Kerjaama Daerah dengan Pemerintahan Daerah dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri) yang di laksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 bertempat di ruang rapat TIK Gd. Dinas Kominfo Provinsi Banten dengan</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>menghadirkan 25 orang peserta yang berasal dari OPD Provinsi dan 32 orang berasal dari Kabupaten/Kota.</p> <p>Narasumber kegiatan rapat berasal dari Eselon III Kementerian Dalam Negeri, 2 orang dari Eselon II Daerah dan 1 orang yang berasal dari Eselon III daerah. Output yang dihasilkan adalah :</p> <p>b) hal penting yang dihasilkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri yang merupakan bagian dari kerjasama internasional yang harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. disamping itu Pemerintah Daerah dapat menjadi penerima manfaat atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pihak luar negeri yang nantinya akan bersifat penerus kerjasama Pemerintah</li> </ul>	



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				Pusat kepada Pemerintah Daerah; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hendaknya berdasarkan prioritas dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga kerjasama akan memberikan manfaat secara maksimal;</li> <li>• sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Infrastruktur, Pemerintah Daerah juga dapat menggunakan skema <i>Public Private Partnership (PPP)</i> sebagai salah satu alternative skema pendanaan pembangunan yang melibatkan pihak swasta, namun bukanlah privatisasi tetapi pengelolaan asset melalui kensensi;</li> <li>• mitra pembangunan internasional yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia ecara umum memberikan program yang bersifat hibah.</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri sebanyak 0 dokumen	0	<p>namun ada juga yang berupa pinjaman lunak guna mendukung pembangunan di kerjasama menjadi prioritas secara umum dari mitra pembangunan di luar negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, diharapkan mampu menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama daerah guna mendorong percepatan pembangunan di daerah.</li> </ul> <p>Kegiatan tidak dapat dilaksanakan disebabkan dilakukan efisiensi anggaran di sebabkan Pandemi Covid-19.</p>	0
		<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah</b> <b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah</b> <b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>50</b>
		1 Administrasi Rupabumi sebanyak 2 dokumen	100	<p>Terlaksananya Administrasi Rupabumi sebanyak 2 dokumen, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Inventarisasi dan Validasi Rupabumi di Provinsi Banten yang di</li> </ol>	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>laksanakan pada 1 Maret 2020 di Kabupaten Serang, Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan 7 (Tujuh) orang personel yang berasal dari Biro Pemerinthan Setda Provinsi Banten. Hasil yang di peroleh antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data rupabumi Warisan Budaya berupa Bunker, Pos Jaga, Klinik, Barak, Rumah Dokter, Stasiun, Makam dan tempat peribadatan;</li> <li>b. Data yang di peroleh bukan hanya bentuk fisik bangunan, namun juga asal usul serta sejarah di balik pendirian bangunan;</li> <li>c. Dimungkinkan untuk adanya rekomendasi berupa penelitian lanjutan terkait keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya baik dalam satu pulau maupun berbeda pulau atau di wilayah-wilayah lainnya.</li> </ul> <p>2. Direncanakan akan dilaksanakan koordinasi ke DIY terkait dengan pelaksanaan Administrasi</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2 Administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten sebanyak 2 dokumen	100	<p>yang di laksanakan di DIY yang sudah lebih baik jika di bandingkan dengan daerah lainnya. Namun, akibat terkendala dengan Covid - 19 maka kegiatan tersebut tidak dapat di laksanakan.</p> <p>Terlaksananya administrasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten sebanyak 1 dokumen, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terlaksananya Rapat Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 dengan mengundang peserta berjumlah 50 orang untuk memperoleh data terbaru Kode Data yang akan di bukukan kembali pada tahun 2021. Namun, karena dampak dari Covid-19 yang mengharuskan adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan ini tidak dapat di laksanakan</li> <li>2. Terlaksananya Cetak Buku Update Kode data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi Banten yang direncanakan pada bulan September 2020 yang di dalamnya memuat Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terbaru di</li> </ol>	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				Provinsi Banten.	
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>80</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 1 dokumen melalui pelaksanaan jajak pendapat dari Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten yang di laksanakan dari tanggal 6 November s/d 16 November 2020	100
		2 Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 4 dokumen	100	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrai Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 3 dokumen, antara lain : 1. Rapat Kerja Inovasi Pelayanan Kecamatan, yang di laksanakan pada 13 February 2020 dan 10 Maret 2020 di Ruang Rapat Lt. II Gd. KPD Terpadu dengan mengundang seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten. Narasumber dalam Rapat Kerja antara lain 1. Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, 2. Kasi Wilayah II Subdit Kecamatan Kemendagri, 3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;	75

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi langsung di Kelurahan di 8 Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten yang menghasilkan beberapa hal yang perlu untuk di sempurnakan dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan se-Provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan pada 24 November 2020 s/d 16 Desember 2020;</p> <p>3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan), dilaksanakan semenjak 4 Desember 2020 s/d 18 Desember 2020. Pelaksanaan kegiatan adalah dengan mendatangi langsung Kelurahan dan Kecamatan di 8 Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten, untuk dapat memperoleh data yang lebih akurat dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten. Hasil yang di peroleh dalam monitoring dan evaluasi</p>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>adalah masih terdapatnya beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang membutuhkan peningkatan Pelayanannya, begitu juga dengan kelengkapan infrastruktur pelayanan yang tidak sedikit masih harus di tingkatkan kembali.</p> <p>4. Rapat Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan tidak dapat di laksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19</p>	
		<p><b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b></p> <p>1 Administrasi Batas Daerah sebanyak 2 Kegiatan</p>	100	<p><b>Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah</b></p> <p>Terlaksananya administrasi Batas Daerah sebanyak 1 dokumen antara lain :</p> <p>1. pelaksanaan Rapat Koordinasi dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang Provinsi Banten pada hari Selasa 18 Februari 2020 yang di laksanakan di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Lt. 2 Gedung SKPD Terpadu Kawasan Pusat</p>	75
			100		50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Kota Serang dengan peserta berjumlah 50 Orang (Dinas/Instansi terkait, Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Serang dan Kota Serang yang berbatasan) dan narasumber berasal dari Kasubdit Batas antar Daerah Wilayah I Kemendagri, Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Batas Daerah).                      output yang di harapkan adalah Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas Daerah antara Kabupaten Serang dan Kota Serang.</p> <p>2. Rapat korrordinasi kedua tidak dapat di laksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19</p>	
		2 Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah sebanyak 2 Kegiatan	100	<p>Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Pilar Batas Wilayah sebanyak 2 kegiatan, antara lain :</p> <p>1. terlaksananya pembangunan pilar batas daerah Provinsi Banten</p>	100



NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>sebanyak 8 pilar batas wilayah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta pada bulan Oktober s/d November 2020.</p> <p>2. terlaksannya pemeliharaan pilar batas wilayah sebanyak 4 pilar batas antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Oktober s/d November 2020.</p>	
		<p><b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 13 dokumen</b></p> <p>1 Penyusunan Kebijakan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah sebanyak 1 dokumen</p> <p>2 Penyusunan LPPD dan IKK Provinsi Banten sebanyak 2 dokumen</p>	<p><b>100</b></p> <p>100</p> <p>100</p>	<p><b>Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 13 dokumen</b></p> <p>Tersusunnya rumusan kebijakan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang diawali dengan koordinasi dan konsultasi baik dengan pihak Kementerian khususnya Kemendagri maupun dengan 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang dilaksanakan pada bulan Oktober s/d Desember 2020. Hasil yang di peroleh adalah rumusan kebijakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.</p> <p>Terlaksananya penyusunan LPPD dan IKK LPPD Provinsi Banten tahun 2019 sebanyak 2 dokumen berupa Buku</p>	<p><b>100</b></p> <p>100</p> <p>100</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				LPPD dan Buku IKK LPPD. Penyusunan dilaksanakan semenjak bulan Januari s/d Maret 2020 yang dilaksanakan pada Kantor Biro Pemerintahan setda Provinsi Banten. Pengumpulan dan penyusunan LPPD dan IKK LPPD Provinsi Banten diawali dengan pengumpulan data dari setiap OPD Provinsi Banten yang kemudian diolah hingga menghasilkan buku LPPD dan IKK LPPD Provinsi Banten 2019.	
		3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen	100	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebanyak 1 dokumen yang diawali dengan kegiatan Pra-LPPD Kab/Kota Se-Provinsi Banten pada bulan Juni s/d Agustus 2020, yang kemudian data-data tersebut di evaluasi hingga menghasilkann hasil evaluasi berupa rekomendasi-rekomendasi yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Kab/Kota untuk kemudian mendapatkan penilaian dari tim evaluasi LPPD Provinsi Banten.	100
		4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 9 Dokumen	100	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen yang dilaksanakan pada tanggal 6	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				s/d 8 Oktober 2020 yang dilaksanakan di ruang Rapat Biro Pemerintahan Lt. II SKPD Terpadu. Kegiatan dilaksanakan dengan pemanggilan tim penyusun LPPD dan IKK LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten untuk mendapatkan pembekalan dan evaluasi hingga penilaian dari Tim Nasional Penilai LPPD. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa penilaian LPPD dan IKK LPPD dari Kab/Kota se-Provinsi Banten.	
		<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>100</b>	<b>Penataan Daerah Otonom</b>	<b>50</b>
		1 Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Penataan Daerah sebanyak 1 dokumen terkait dengan Laporan pelaksanaan Penetapan Standart Pelayanan Minimal tahun 2019 yang di rumuskan dan dievaluai pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan, Gd. SKPD terpadu lantai II. Peserta yang hadir berjumlah 48 orang dari OPD Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi dan BAPPEDA Kab/ Kota di Provinsi Banten, dengan narasumber berjumlah 3 orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		2. Penataan Daerah Otonom sebanyak 1 Dokumen	100	Kegiatan penataan daerah otonom tidak dapat dilaksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19	0
		3. Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah sebanyak 2 Dokumen	100	<p>Terselenggaranya Penyelesaian Pelimpahan Aset Antar Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terlaksananya rekon data asset Kabupaten / Kota se Provinsi Banten, begitupula asset yang di miliki dan di kelola oleh Provinsi Banten yang di laksanakan pada bulan Januari 2020, yang menghasilkan data asset yang di miliki dan dikelola oleh Provinsi Banten hingga Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten, juga data asset yang dimilikii oleh Pemerintah Pusat.</li> <li>2. Untuk target kedua yakni terkait dengan rapat penyelesaian pelimpahan asset yang di rencanakan dilaksanakan pada bulan Agustus tidak dapat di laksanakan di sebabkan adanya efisiensi anggaran untuk Covid-19.</li> </ol>	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
		<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>100</b>	<b>Administrasi Kepala Daerah dan DPRD</b>	<b>100</b>
		1 Penyusunan Kebijakan Administrasi Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Administrasi Kepala Daerah sebanyak 1 dokumen melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan pelaksanaannya khususnya mengenai tata cara dan pelaksanaan seluruh administrasi terkait Kepala Daerah. Kegiatan di laksanakan pada bulan Juni s/d November 2020 di seluruh Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten. Hal ini bertujuan terbangunnya sinkronisasi antara Kabupaten / Kota dengan Provinsi, yang pada akhirnya mampu membangun sinergisitas yang baik.	100
		2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen	100	Terlaksananya Adminitrasi Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 1 dokumen melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Gd. SKPD Terpadu Lantai II. Peserta yang hadir dalam kegiatan berjumlah 50 orang yang berasal dari OPD Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten serta	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT	%	KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT	%
1	2	3		4	5
				<p>perwakilan OPD Provinsi Banten. Narasumber kegiatan terdiri atas 2 (Dua) orang setara eselon III Kementerian Dalam Negeri dan 1 (Satu) orang setara Eselon II Daerah. Output kegiatan pelaksanaan rapat adalah dapat memberikan pemahaman dan penekanan kepada kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan izin alasan penting bagi kepala daerah dan DPRD sehingga dapat terlaksananya tertib administrasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dalam hal ini kemendagri dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota.</p> <p>Di rencanakan sebelumnya bahwa kegiatan akan di laksanakan dua kali rapat koordinasi, namun akibat terjadinya pandemic Covid - 19 yang kemudian dilakukan efisiensi anggaran, maka kegiatan kedua tidak dapat dilaksanakan, dan hanya melalui teleconverence.</p>	

## **BAB IX**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **A. PERMASALAHAN**

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Pemkesra yang mengganggu jalannya kinerja pada tahun 2001. Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2021, diantaranya :

1. Belum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kerjasama Daerah;
2. Belum adanya rincian dan indikator terkait pengukuran nilai IKM;

#### **B. SOLUSI**

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);

## **BAB X**

### **P E N U T U P**

Penyusunan laporan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten akhir tahun anggaran 2021 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun anggaran. Evaluasi kinerja menyajikan informasi capaian indikator kinerja input, output, outcome dan capaian program tahunan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten difokuskan kepada upaya pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022.

**Serang, 7 Januari 2022**

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**



**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741004 199402 1 002



Lampiran 1:

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten  
 Fungsi : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
 Sub Fungsi : Administrasi Pemerintahan  
 Provinsi : Banten

KODE	Program	BELANJA		HASIL/KELUARAN			KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>5,2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>20.160.770.750,00</b>	<b>17.332.301.064,00</b>				
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.322.925.750,00</b>	<b>2.085.237.252,00</b>				
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.200.250,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250,00	0,00	0	0	-	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	1	1	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel CALK, Prognosis, Neraca dan Aset)
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	1	1	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran sesuai Kebutuhan (Belanja ATK dan Cetak)
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	1	1	Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan yang rapih dan informatif (Pengelolaan Arsip)
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	1	1	Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Akurat (Pengelolaan Website)
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.100.000,00	0,00	1	0	Kegiatan	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.100.000,00	0,00	1	0	Kegiatan	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>				
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.100.000,00	5.750.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya administrasi keuangan Perangkat Daerah
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.721.500,00</b>	<b>154.490.000,00</b>				
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250,00	0,00	0	0	-	
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170.721.000,00	154.490.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.1.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250,00	0,00	0	0	-	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>564.104.000,00</b>	<b>448.495.500,00</b>				
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.094.000,00	197.755.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.560.000,00	65.680.000,00	1	1	Dokumen	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa Perkantoran
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.592.000,00	110.667.500,00	1	1	Dokumen	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa Perkantoran
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.858.000,00	74.393.000,00	1	1	Dokumen	Terselenggaranya fungsi perangkat daerah
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.550.800.000,00</b>	<b>1.466.501.752,00</b>				
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.550.800.000,00	1.466.501.752,00	1	1	Kegiatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>4.01.03</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1.262.133.000,00</b>	<b>868.296.250,00</b>				
<b>4.01.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>374.966.000,00</b>	<b>194.881.000,00</b>				
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	129.763.000,00	44.536.500,00	1	1	Kegiatan	Meningkatnya kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	84.914.000,00	49.451.500,00	1	1	Kegiatan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemerintahan Umum
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	160.289.000,00	100.893.000,00	1	1	Kegiatan	Terfasilitasinya Penataan Wilayah
<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>489.167.000,00</b>	<b>386.596.750,00</b>				

KODE	Program	BELANJA		HASIL/KELUARAN			KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	140.000.000,00	115.758.750,00	1	1	Kegiatan	Terfasilitasinya pelayanan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	119.060.000,00	102.008.000,00	1	1	Kegiatan	Persentase Realisasi Kebijakan Kerjasama Pemerintahan
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	230.107.000,00	168.830.000,00	1	1	Dokumen	Tersedianya bahan rumusan Kebijakan Administrasi Pemerintahan
<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>286.818.500,00</b>				
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah	306.026.000,00	243.862.000,00	1	1	Dokumen	Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	45.310.000,00	16.741.500,00	1	1	Dokumen	Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama Badan Usaha/Swasta
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	46.664.000,00	26.215.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen bahan kebijakan bersama
<b>4.01.04</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>16.575.712.000,00</b>	<b>14.378.767.562,00</b>				
<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Menta Spiritual</b>	<b>15.904.532.000,00</b>	<b>14.056.551.562,00</b>				
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	540.363.000,00	76.036.000,00	1	1	Kegiatan	Terselenggaranya Hari besar keagamaan
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	15.364.169.000,00	13.980.515.562,00	1	1	Kegiatan	Terdistribusinya hibah untuk lembaga kemasyarakatan
<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>406.432.000,00</b>	<b>205.102.000,00</b>				
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	53.196.000,00	46.636.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	143.316.000,00	73.796.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	209.920.000,00	84.670.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>264.748.000,00</b>	<b>117.114.000,00</b>				
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	79.596.000,00	65.836.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	123.976.000,00	27.076.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	61.176.000,00	24.202.000,00	1	1	Dokumen	Tersusunnya dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1: Diisi dengan kode kegiatan dimaksud

Kolom 2: Diisi dengan nama kegiatan dan indikator kerjanya

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa

Contoh indikator kinerja : Panjang Jalan, Frekuensi Pembinaan

Kolom 3: Diisi dengan jumlah anggaran pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan (sama dengan Laporan Realisasi Anggaran)

Kolom 4: Diisi dengan jumlah realisasi pengeluaran/belanja yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan (sama dengan Laporan Realisasi Anggaran)

Kolom 5: Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang direncanakan (sasaran keluaran) oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja

Kolom 6: Diisi dengan jumlah atau kuantitas keluaran yang telah dicapai oleh Satuan Kerja untuk masing-masing indikator kinerja

Kolom 7: Diisi dengan satuan keluaran yang akan digunakan untuk menilai atau mengukur barang atau jasa yang dihasilkan

Contoh satuan keluaran : Orang (yang dilayani), Km (jalan Yang dibangun), Buah (surat ijin yg diterbitkan)

Kolom 8: Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Serang, Desember 2021  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI BANTEN



**GUNAWAN RUSMIPTO, AP, M.Si**  
NIP.19741004 199402 1 002

Lampiran 1 :

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

Fungsi : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Sub Fungsi : Administrasi Pemerintahan

Provinsi : Banten

KODE	Program	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5,2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>20.160.770.750,00</b>	<b>17.332.301.064,00</b>	<b>85,97</b>
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.322.925.750,00</b>	<b>2.085.237.252,00</b>	<b>89,77</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.200.250,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>35,46</b>
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.100.000,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.100.000,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>63,19</b>
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.100.000,00	5.750.000,00	63,19
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.721.500,00</b>	<b>154.490.000,00</b>	<b>90,49</b>
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170.721.000,00	154.490.000,00	90,49
4.01.01.1.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>564.104.000,00</b>	<b>448.495.500,00</b>	<b>79,51</b>
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.094.000,00	197.755.000,00	91,94
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.560.000,00	65.680.000,00	90,52
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.592.000,00	110.667.500,00	91,77
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.858.000,00	74.393.000,00	47,73
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.550.800.000,00</b>	<b>1.466.501.752,00</b>	<b>94,56</b>
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.550.800.000,00	1.466.501.752,00	94,56
<b>4.01.03</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1.262.133.000,00</b>	<b>868.296.250,00</b>	<b>68,80</b>
<b>4.01.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>374.966.000,00</b>	<b>194.881.000,00</b>	<b>51,97</b>
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	129.763.000,00	44.536.500,00	34,32
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	84.914.000,00	49.451.500,00	58,24
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	160.289.000,00	100.893.000,00	62,94
<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>489.167.000,00</b>	<b>386.596.750,00</b>	<b>79,03</b>
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	140.000.000,00	115.758.750,00	82,68
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	119.060.000,00	102.008.000,00	85,68
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	230.107.000,00	168.830.000,00	73,37
<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>286.818.500,00</b>	<b>72,06</b>
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah	306.026.000,00	243.862.000,00	79,69
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	45.310.000,00	16.741.500,00	36,95
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	46.664.000,00	26.215.000,00	56,18
<b>4.01.04</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>16.575.712.000,00</b>	<b>14.378.767.562,00</b>	<b>86,75</b>
<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Menta Spiritual</b>	<b>15.904.532.000,00</b>	<b>14.056.551.562,00</b>	<b>88,38</b>
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	540.363.000,00	76.036.000,00	14,07
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	15.364.169.000,00	13.980.515.562,00	90,99
<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>406.432.000,00</b>	<b>205.102.000,00</b>	<b>50,46</b>
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	53.196.000,00	46.636.000,00	87,67
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	143.316.000,00	73.796.000,00	51,49
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	209.920.000,00	84.670.000,00	40,33
<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>264.748.000,00</b>	<b>117.114.000,00</b>	<b>44,24</b>
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	79.596.000,00	65.836.000,00	82,71
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	123.976.000,00	27.076.000,00	21,84
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	61.176.000,00	24.202.000,00	39,56

Lampiran 1 :

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten

Fungsi : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Sub Fungsi : Administrasi Pemerintahan

Provinsi : Banten

KODE	Program	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5,2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>20.160.770.750,00</b>	<b>17.332.301.064,00</b>	<b>85,97</b>
<b>4.01.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.322.925.750,00</b>	<b>2.085.237.252,00</b>	<b>89,77</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.200.250,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>35,46</b>
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.100.000,00	0,00	0,00
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.100.000,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>63,19</b>
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.100.000,00	5.750.000,00	63,19
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>170.721.500,00</b>	<b>154.490.000,00</b>	<b>90,49</b>
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250,00	0,00	0,00
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170.721.000,00	154.490.000,00	90,49
4.01.01.1.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250,00	0,00	0,00
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>564.104.000,00</b>	<b>448.495.500,00</b>	<b>79,51</b>
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.094.000,00	197.755.000,00	91,94
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.560.000,00	65.680.000,00	90,52
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.592.000,00	110.667.500,00	91,77
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.858.000,00	74.393.000,00	47,73
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.550.800.000,00</b>	<b>1.466.501.752,00</b>	<b>94,56</b>
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.550.800.000,00	1.466.501.752,00	94,56
<b>4.01.03</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>1.262.133.000,00</b>	<b>868.296.250,00</b>	<b>68,80</b>
<b>4.01.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>374.966.000,00</b>	<b>194.881.000,00</b>	<b>51,97</b>
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	129.763.000,00	44.536.500,00	34,32
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	84.914.000,00	49.451.500,00	58,24
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	160.289.000,00	100.893.000,00	62,94
<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>489.167.000,00</b>	<b>386.596.750,00</b>	<b>79,03</b>
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	140.000.000,00	115.758.750,00	82,68

KODE	Program	BELANJA		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	119.060.000,00	102.008.000,00	85,68
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	230.107.000,00	168.830.000,00	73,37
<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>398.000.000,00</b>	<b>286.818.500,00</b>	<b>72,06</b>
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah	306.026.000,00	243.862.000,00	79,69
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	45.310.000,00	16.741.500,00	36,95
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	46.664.000,00	26.215.000,00	56,18
<b>4.01.04</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>16.575.712.000,00</b>	<b>14.378.767.562,00</b>	<b>86,75</b>
<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Menta Spiritual</b>	<b>15.904.532.000,00</b>	<b>14.056.551.562,00</b>	<b>88,38</b>
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	540.363.000,00	76.036.000,00	14,07
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	15.364.169.000,00	13.980.515.562,00	90,99
<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>406.432.000,00</b>	<b>205.102.000,00</b>	<b>50,46</b>
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	53.196.000,00	46.636.000,00	87,67
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	143.316.000,00	73.796.000,00	51,49
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	209.920.000,00	84.670.000,00	40,33
<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>264.748.000,00</b>	<b>117.114.000,00</b>	<b>44,24</b>
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	79.596.000,00	65.836.000,00	82,71
4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	123.976.000,00	27.076.000,00	21,84
4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	61.176.000,00	24.202.000,00	39,56